

PENGARUH DIVERSITAS *GENDER* DEWAN DIREKSI DAN UKURAN DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018)

Nisrina Nuril Mala, M. Didik Ardiyanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of board gender diversity and board size on corporate tax avoidance. The dependent variable of tax avoidance is measured by the effective tax rate (ETR), while the independent variables of board gender diversity and board size are measured by dummy variables and the number of board members in five years, respectively. This study also uses control variables consisting of leverage, return on assets, capital intensity, and company age (age). The population in this study are banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2018. This study used a purposive sampling method and obtained 65 samples. This study uses multivariate regression analysis for hypotheses testing. The results of the analysis show that gender diversity of company boards as measured by the presence of female members on the company's board of directors has a positive and insignificant effect on tax avoidance. This study also shows that board size has a negative and insignificant effect on tax avoidance.

Keywords: Gender diversity, board of directors, board size, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan yang ada pada negara. Pada berbagai negara, pembangunan dan sumber dana yang berasal dari pajak berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa. Pajak diatur berdasarkan undang-undang dan orang yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan pengertian tersebut, bagi pemerintah pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran umum yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Disisi lain, pajak dianggap sebagai pengeluaran wajib bagi masyarakat sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak.

Terdapat banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun pada penelitian ini penulis memfokuskan pada diversitas *gender* dewan direksi dan ukuran dewan direksi. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pihak perusahaan dan bukan merupakan suatu kebetulan. Dewan direksi merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan kredibilitas proses pelaporan keuangan, jaminan kualitas informasi, termasuk menghitung kewajiban pajak.

Di Indonesia terdapat beberapa wanita yang menjabat sebagai direktur perusahaan. Beberapa wanita tersebut adalah Dhalia Mansor Ariotedjo sebagai Direktur Bisnis dan Korporasi bekerja di Bank Central Asia. Adi Sulistyowati sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan di Bank Negara Indonesia. (www.idx.co.id).

Mempertimbangkan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku dewan wanita yang lebih menghindari risiko daripada laki-laki sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riley & Chow (1992), Barber & Odean (2005), Duasa & Yusof (2013), Mudiyansele & Jayathilake (2013). Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dalam menghadapi risiko antara wanita dan

¹ Corresponding author, E-mail: mdidika@yahoo.com

pria. Perbedaan karakter antara wanita dan pria akan berpengaruh pada sikap dan keputusan yang diambil. Secara umum, perempuan dipandang sebagai *risk-averse* daripada laki-laki. Atas kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa CFO yang berjenis kelamin perempuan akan lebih rendah melakukan kegiatan penghindaran pajak daripada CFO yang berjenis kelamin laki-laki.

Ukuran dewan juga dianggap berpengaruh pada penghindaran pajak. Menurut Zahra dan Pearce (1989) penghindaran pajak merupakan kesenjangan informasi antara eksekutif dan *shareholders*. Hal ini dapat terjadi pada pada keputusan anggota dewan direksi mereka, dengan menghindari pajak dan meningkatkan biaya representasi. Kontrol dewan terhadap acara dewan yang besar ditempatkan pada individu dan kelompok yang berpengaruh. Kehadiran kelompok mayoritas lebih berpengaruh daripada kehadiran kelompok minoritas.

Dalam hal perpajakan, beberapa peneliti telah melakukan penelitian secara khusus tentang dampak diversitas *gender* terhadap penghindaran pajak. Lanis & Richardson (2011) serta Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dewan eksekutif terhadap adanya perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan pemilihan risiko antara wanita dan pria pada investasi portofolio mereka (Francis *et al.*, 2014). Dapat disimpulkan bahwa dewan eksekutif wanita lebih menghindari risiko daripada laki-laki. Selain itu, menurut Hillman dan Dalziel (2003) menjelaskan bahwa peran direktur wanita di dewan perusahaan diyakini lebih efektif dalam memantau proses keseimbangan kepentingan pemegang saham dan masyarakat daripada laki-laki.

Penelitian mengenai hubungan ukuran dewan direksi dengan penghindaran pajak juga sering dilakukan di Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia menyebutkan keterkaitan ukuran dewan komisaris dengan penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyebutkan ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi penghindaran pajak (Pramudito dan Sari, 2015). Hasil ini didukung oleh studi Sari dan Martani (2013). Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap praktik penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh diversitas *gender* dewan dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi dalam Jensen dan Meckling (1976) adalah kontrak dimana satu atau lebih orang (*the principals*) mempekerjakan orang lain (*the agent*) untuk melakukan atas nama mereka serta memberikan beberapa wewenang pada agent dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham berperan sebagai *principal* dalam suatu perusahaan yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dalam bentuk laba perusahaan. Laba perusahaan yang diperoleh dapat meningkatkan dividen yang diperoleh para pemegang saham. Sementara *agent* adalah dewan direksi yang bertugas untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan publik, *principal* ingin memaksimalkan nilai saham mereka sementara *agent* ingin memaksimalkan utilitas mereka. Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan terjadinya *conflict of interest*. Jika kedua belah pihak adalah *utility maximizers* maka terdapat alasan bahwa tidak selalu perilaku *agent* sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen, 1994). Kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent* membuat masing-masing pihak berupaya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Teori agensi berfokus pada hubungan antara *principal* (*shareholders*) dan *agents* (manajemen perusahaan)

Teori Legitimasi

Teori legitimasi memberikan kerangka berpikir pentingnya legitimasi *stakeholder* dalam rangka menjaga *going concern* perusahaan (Hadi, 2009). Legitimasi juga dikaitkan dengan keadaan orang dan kelompok orang yang memiliki rasa peka pada lingkungan (Hadi, 2009). Menurut Ghazali dan Chariri (2007) teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana masyarakat telah mempersilahkan perusahaan untuk melakukan operasi dan menggunakan sumber ekonomi. Menurut Lanis dan Richardson (2011) legitimasi secara implisit diibaratkan sebagai kontrak sosial antara perusahaan dan lingkungan, istilah yang diturunkan dari ekspektasi kelompok dalam *society*. Teori legitimasi menyarankan pelaksanaan *corporate social responsibility* dan legitimasi dengan cara tidak melakukan penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2011). Teori legitimasi memperkuat penjelasan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak.

Teori Feminisme

Teori feminisme merupakan teori yang menyatakan bahwa golongan wanita sama derajatnya dengan golongan pria. Feminisme berusaha menghilangkan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat (Hidayat, 2019). Salah satu pelopor feminisme adalah Marx dan Engels, mereka menyepakati betapa pentingnya hubungan antar struktur masyarakat dan pembagian peran kerja berdasarkan jenis kelamin (Hidayat, 2019). Menurut Hidayat (2019) istilah feminisme sering disalahpahami sebagai emansipasi kaum perempuan, padahal istilah yang dimaksud mengacu pada pergerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum laki-laki dan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak keduanya secara adil.

Pengaruh Diversitas Gender Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Terdapat perbedaan karakteristik, cara berpikir dan gaya kepemimpinan pada pria dan wanita. Penelitian Betz *et al.* (2013) serta Bernardi dan Arnold (1997) menemukan bahwa direktur wanita lebih *risk-averse* dibandingkan direktur pria dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Betz *et al.* (2013) juga mengamati bahwa direktur wanita cenderung mempunyai sudut pandang moral dan etika yang tinggi daripada pria tentang penggunaan uang, akuntansi dan masalah keuangan. Hasil penelitian Carter *et al.* (2003) menunjukkan bahwa direktur wanita lebih memiliki independensi pemikiran yang tinggi daripada direktur pria, hal ini sangat penting untuk pemikiran dewan yang efektif.

Menurut teori legitimasi untuk menjaga *going concern* perusahaan maka perusahaan harus melakukan pembayaran pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2011) legitimasi secara implisit diibaratkan sebagai kontrak sosial antara perusahaan dan lingkungan, istilah yang diturunkan dari ekspektasi kelompok dalam *society*. Menurut (Lanis & Richardson, 2011) teori legitimasi menyarankan pelaksanaan *corporate social responsibility* dan legitimasi dengan cara tidak melakukan penghindaran pajak.

Kehadiran dewan direksi wanita yang bersifat *risk-averse* dapat mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang tinggi. Jika dikaitkan dengan teori feminisme wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Meningkatnya prosentase wanita pada dewan perusahaan memberikan dampak pada berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Maka dari itu, kehadiran dewan direksi wanita diharapkan dapat mengurangi agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2011) meneliti hubungan antara komposisi dewan direktur dan penghindaran pajak di Australia dan menemukan bahwa kemungkinan pajak berkurang jika ada proporsi tinggi dari direktur independen. Brown (2011) juga menemukan hubungan antara *board interlocks* dan agresivitas pajak.

Oleh karena itu, peningkatan prosentase wanita dalam dewan direksi dapat mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat diperoleh analisa pengembangan hipotesis:

H1 :Diversitas gender dewan direksi perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran dewan yang ada pada suatu perusahaan berdampak pada penghindaran pajak yang dilakukan. Jensen (1993) berpendapat bahwa ketika dewan perusahaan kecil makan fungsi pengendalian dapat dilakukan dengan baik, namun ketika ukuran dewan lebih besar, kemungkinan mempunyai fungsi pengendalian manajemen yang efektif menjadi lebih kecil. Pada kenyataannya, ukuran dewan berpengaruh terhadap kebijakan manajemen suatu perusahaan. Ukuran dewan merujuk pada jumlah direktur dalam dewan direksi suatu perusahaan.

Menurut teori keagenan, ukuran dewan direksi yang kecil akan menunjukkan performa yang lebih tinggi dan memberikan jaminan pengawasan, sebaliknya ukuran dewan direksi yang besar dikaitkan dengan kinerja yang buruk. Ukuran dewan direksi yang kecil dapat menjamin adanya pengawasan yang baik sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak sedangkan ukuran dewan direksi yang besar menimbulkan penghindaran pajak yang besar Jensen (1993). Hal ini dikarenakan kepentingan pribadi *agent* menjadi lebih besar dengan adanya ukuran dewan

direksi yang besar. Menurut Jensen (1993) ukuran dewan direksi yang besar kurang efektif dan tidak mudah dikontrol oleh CEO. Hal tersebut juga disetujui oleh Lipton dan Lorsch (1992).

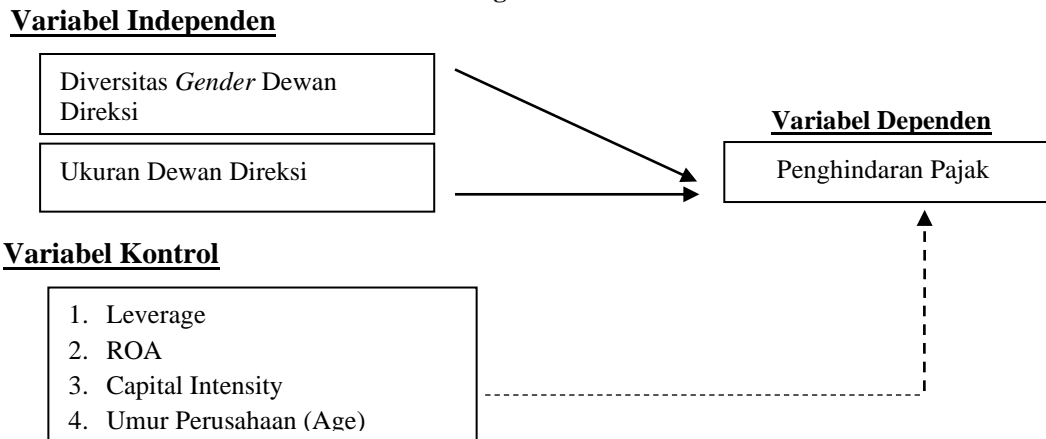
Sementara itu, Khaoula dan Ali (2012) melaporkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan dan agresivitas pajak di Amerika. Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan ukuran dewan direksi yang kecil memperkuat manajemen pajak yang baik, sementara ukuran dewan direksi yang lebih besar meningkatkan terjadinya agresivitas pajak perusahaan.

Oleh karena itu, peningkatan ukuran dewan direksi dapat meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat diperoleh analisa pengembangan hipotesis:

H2 :Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Hubungan antara diversitas *gender* dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan penghindaran pajak dapat saling terkait. Hubungan antara variabel dalam penelitian tersebut akan dijelaskan dalam gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel dependen penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan diukur dengan ETR. ETR diperoleh dengan cara membagi total beban pajak dengan laba sebelum pajak penghasilan, rumus tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hoseini *et al.*, 2019). Berikut ini merupakan rumus ETR:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Tabel 1
Definisi Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Pengukuran Variabel
1	Diversitas <i>gender</i> dewan direksi	Variabel dummy. 1 untuk ada wanita di dewan direksi. 0 untuk tidak ada wanita di dewan direksi
2	Ukuran dewan direksi	Jumlah dewan direksi
3	Leverage	Total liabilitas dibagi total asset
4	ROA	Laba bersih dibagi total asset
5	Capital Intensity	Total asset tetap dibagi total asset

6	Age	Umur perusahaan diukur sejak tahun perusahaan tersebut didirikan hingga perusahaan tersebut dijadikan sampel dalam penelitian
---	-----	---

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018.

Metode penelitian dalam pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil akhir dari pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* mendapatkan jumlah sampel sebanyak 13 sampel selama 5 periode. Sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 65 (13 x 5 periode).

Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap hipotesis yang telah ditentukan maka peneliti menggunakan analisis regresi berganda (multivariate analysis) dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 25.

Model yang digunakan sebagai berikut :

$$ETR = \alpha - \beta_1 WOMAN + \beta_2 BOSIZE + \beta_3 LEV + \beta_4 ROA + \beta_5 CAPINT + \beta_6 AGE + e$$

Keterangan:

- ETR : Penghindaran pajak
- a : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$: Koefisien regresi
- WOMAN : Keberadaan dewan direksi wanita
- BOSIZE : Jumlah dewan perusahaan.
- LEV : *Leverage* atau rasio utang perusahaan
- ROA : Profitabilitas
- CAPINT : *Capital Intensity*
- AGE : Umur perusahaan
- e : *Standart error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berikut ini menyajikan data yang diperoleh peneliti dalam proses pengumpulan data.

Tabel 2
Rincian Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah
1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI	44
Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel	
1. Perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2014-2018	9
2. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian	11
Jumlah perusahaan sampel	24
Outlier	11
Jumlah perusahaan sampel	13
Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini 13 x 5	65
Jumlah Sampel Akhir	65

Sumber: Diidentifikasi oleh Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi dalam penelitian ini sejumlah 44 perusahaan dengan sampel yang didapat sejumlah 13 perusahaan selama 5 periode, yaitu dari tahun 2014-2018 yang dihitung dengan menggunakan kriteria *purposive sampling*. Dengan demikian total data yang didapat sebanyak 65 data (13 perusahaan x 5 periode).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	65	2 persen	35 persen	24 persen	5 persen
BOSIZE	65	4 orang	12 orang	7 orang	2 orang
LEV	65	74 persen	97 persen	84 persen	5 persen
ROA	65	0 persen	3 persen	1 persen	1 persen
CAPINT	65	1 persen	8 persen	3 persen	2 persen
AGE	65	25 tahun	86 tahun	51 tahun	17 tahun
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diolah tahun 2020

Tabel 4
Hasil Uji Deskriptif Frekuensi

		WOMAN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Ada Wanita	18	27,69	27,69	27,69
	Ada Wanita	47	72,31	72,31	100,0
	Total	65	100,0	100,0	

Sumber: Output dari data sekunder yang diolah tahun 2020

Variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR. ETR diukur dengan menghitung total beban pajak dan laba sebelum pajak. ETR menunjukkan nilai rata-rata sebesar 24%. Sedangkan nilai maksimum sebesar 35% dan nilai minimum sebesar 2%. Nilai deviasi standar sebesar 5%.

Variabel independen pertama adalah diversitas gender dewan perusahaan (WOMAN). WOMAN diukur dengan jumlah dewan direksi wanita dan total jumlah dewan direksi. Untuk hasil deskriptif frekuensi variabel WOMAN dapat dilihat pada tabel 4 hasil analisis dengan *variabel dummy* menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki direktur wanita sebanyak 47 dari jumlah penelitian sebanyak 65 pengamatan. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki direktur wanita sebanyak 18 dari jumlah penelitian sebanyak 65 pengamatan. Jadi dapat disimpulkan 72,31% perusahaan telah memiliki direktur wanita untuk perusahaan yang mereka kelola. Sisanya tidak memiliki direktur wanita.

Variabel independen kedua adalah ukuran dewan (BOSIZE). BOSIZE diukur dengan jumlah dewan direksi yang ada di perusahaan. BOSIZE memiliki rata-rata sebesar 7 orang. Nilai maksimum data sebesar 12 orang dan nilai minimum data sebesar 4 orang. Nilai deviasi standar sebesar 2 orang.

Variabel kontrol pertama adalah rasio utang atas total aset (LEV). LEV diukur dengan menggunakan total utang dan total aset perusahaan. LEV memiliki rata-rata sebesar 84%. Nilai maksimum data sebesar 97% dan nilai minimum data sebesar 74%. Sedangkan nilai deviasi standar sebesar 5%.

Variabel kontrol kedua adalah rasio profitabilitas (ROA). ROA diukur menggunakan total laba bersih dan total aset. ROA memiliki rata-rata sebesar 1%. Nilai maksimum data sebesar 3% dan nilai minimum data sebesar 0%. Sedangkan nilai deviasi standar sebesar 1%.

Variabel kontrol ketiga adalah capital Intensity (CAPINT). CAPINT diukur dengan total asset tetap dan total asset. CAPINT memiliki rata-rata sebesar 3%. Nilai maksimum data sebesar 8% dan nilai minimum data sebesar 1%. Sedangkan nilai deviasi standar sebesar 2%.

Variabel kontrol keempat adalah umur perusahaan (AGE). AGE memiliki nilai rata-rata sebesar 51 tahun. Nilai maksimum data sebesar 86 tahun dan nilai minimum data sebesar 25 tahun. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 17 tahun.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- i. Uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai sebesar 0,200 dan nilainya diatas 0,05. Dengan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.
- ii. Uji multikolonieritas menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang melebihi 10 dan nilai *tollerance* tidak ada yang kurang dari 0,1. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi diantara variabel independen dan variabel kontrol.
- iii. Uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* menunjukkan seluruh variabel independen memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan data tidak bersifat heteroskedastisitas atau bersifat homokedastisitas.
- iv. Uji autokorelasi dengan menggunakan *run test* menunjukkan besarnya tingkat signifikansi 0,170 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data bersifat acak dan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	,558	,197		2,830	,006
	WOMAN	,001	,016	,006	,040	,968
	BOSIZE	-,006	,004	-,260	-1,599	,115
	LEV	-,315	,206	-,300	-1,530	,132
	ROA	-1,142	1,067	-,185	-1,071	,289
	CAPINT	-,779	,375	-,318	-2,077	,042
	AGE	,001	,000	,188	1,170	,247

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS dari data sekunder yang diolah tahun 2020

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel diversitas *gender* dewan direksi yaitu sebesar 0,968. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi diversitas *gender* dewan direksi > 0,05 maka hipotesis pertama ditolak. Jadi diversitas *gender* dewan direksi perusahaan tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak.

Nilai signifikansi variabel ukuran dewan direksi yaitu sebesar 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi ukuran dewan direksi > 0,05 maka hipotesis kedua ditolak. Jadi ukuran dewan direksi perusahaan tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Diversitas Gender Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian mendapatkan bahwa diversitas *gender* dewan direksi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisiensi variabel tersebut mempunyai

tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel diversitas *gender* dewan direksi yang diprosikan dengan kehadiran wanita di dewan direksi bersifat tidak signifikan. Hal ini berarti diversitas *gender* dewan direksi perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Alasan yang mendasar dalam hal ini adalah dewan direksi perusahaan dipilih berdasarkan profesionalitas bukan berdasarkan *gender*. Keragaman *gender* dewan tidak berdampak pada penurunan jumlah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal penghindaran pajak. Direktur pria maupun wanita sama-sama bersikap profesional dan memiliki tanggung jawab sebagai direksi di suatu perusahaan. *Gender* bukan menjadi penghalang untuk memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas.

Sesuai dengan teori agensi yang menekankan bahwa pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Francis et al. (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada beda bukti bahwa CFO wanita mempunyai perilaku yang berbeda dari pria dalam hal aktivitas penghindaran pajak yang lebih rendah. Francis et al. (2014) menyatakan bahwa keberagaman *gender* dalam jajaran direksi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang diukur dengan menggunakan ETR. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Aliani dan Zarai (2012) yang menemukan bahwa keragaman *gender* tidak berdampak pada perencanaan pajak karena rendahnya persentase direktur wanita. Keragaman dalam hal opini, pengetahuan, dan pengalaman tidak mengarah pada berhasilnya praktik minimalisasi pajak (Aliani dan Zarai, 2012).

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian mendapatkan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien variabel tersebut mempunyai tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel ukuran dewan direksi yang diprosikan dengan jumlah dewan direksi tidak signifikan. Hal ini berarti ukuran dewan direksi perusahaan tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan.

Alasan yang mendasar dalam hal ini adalah terdapat aturan legal yang mengatur jumlah, tugas, dan tanggung jawab direksi. Jumlah dewan direksi minimal dalam suatu perusahaan adalah tiga orang. Pemilik perusahaan telah menentukan jumlah dewan direksi perusahaan yang sesuai dengan ukuran perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Apabila jumlah dewan direksi besar maka semakin banyak ahli yang ada pada bidangnya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini didukung oleh penelitian Khoirunnisa (2015) yang menyatakan ukuran dewan direksi tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti menganalisis adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya dikarenakan beberapa hal. Pertama, keterbatasan jumlah sampel pada perusahaan sektor perbankan periode 2014-2018. Peneliti menggunakan sampel pada perusahaan perbankan dengan jumlah perusahaan 13 dan sampel akhir sejumlah 65. Semakin banyak jumlah sampel yang diambil dalam penelitian akan semakin merepresentasikan kondisi nyata. Perbedaan sampel ini menjadi alasan mengapa terjadi perbedaan hasil penelitian pada penelitian ini.

Kedua, jumlah direktur wanita yang ada di direksi perusahaan tidak sebanding dengan jumlah direktur pria pada perusahaan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti keberadaan direktur pria mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah direktur wanita di suatu perusahaan. Keberadaan direktur wanita tidak sebanding dengan keberadaan direktur pria di perusahaan. Jumlah direktur pria lebih mendominasi daripada jumlah direktur wanita. Bahkan terdapat beberapa perusahaan yang sama sekali tidak mempunyai direktur wanita pada dewan perusahaan.

Ketiga, bank merupakan industri dengan aturan yang ketat dan diawasi oleh Bank Indonesia. Aturan yang ketat membuat ukuran dewan direksi telah ditentukan secara tepat oleh perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang ada. Salah satu peraturan Bank Indonesia yang mengatur adanya *Good Corporate Governance Bagi Bank Umum* adalah surat edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 15/15/DPNP mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance Bagi Bank Umum* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 03/2016 tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Umum. Kedua peraturan ini menjelaskan secara detail tentang jumlah minimal anggota direksi serta tugas dan tanggung jawab anggota direksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh diversitas gender dewan direksi dan ukuran dewan terhadap penghindaran pajak pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan sampel 65 perusahaan perbankan yang telah mengalami pengolahan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda maka di dapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengujian variabel diversitas *gender* dewan direksi terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Sehingga hipotesis 1 ditolak.
2. Pengujian variabel ukuran dewan terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis 2 ditolak.

Adapun keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Pertama, data yang dianalisis hanya pada periode lima tahun saja (2014-2018) yang mana menggeneralisasi hasil dari periode waktu lain. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan sampel 13 perusahaan perbankan di Indonesia saja dengan sampel akhir 65. Ketiga, dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen diversitas *gender* dewan dan ukuran dewan direksi saja, diduga terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi besarnya penghindaran pajak. Keempat, pengukuran variabel diversitas *gender* dewan diprosikan dengan menggunakan variabel dummy dimana 1 untuk perusahaan yang memiliki dewan direksi wanita dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki dewan direksi wanita, menyebabkan keterbatasan dalam menjelaskan informasi secara lebih detail. Kelima, nilai *Adjusted R Squared* yang menunjukkan nilai 0,130 mengindikasikan masih adanya variabel lain diluar penelitian yakni sebesar 87% yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan pengukuran variabel diversitas gender dewan direksi dengan menggunakan indikator pengukuran lain yang dapat menggambarkan prosentase keterlibatan wanita dalam penghindaran pajak secara lebih detail. Beberapa pengukuran diversitas gender dewan direksi diantara dengan membagi jumlah dewan direksi wanita dengan jumlah dewan direksi pria. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak seperti kompensasi eksekutif, umur direktur utama, dan masa jabatan direktur utama. Hal tersebut dilakukan agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan dapat menjelaskan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain serta menggunakan sampel perusahaan diluar sektor keuangan agar data yang digunakan lebih bervariasi daripada penelitian ini.

REFERENSI

- Barber, B. M., & Odean, T. (2005). Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment. *SSRN Electronic Journal*, September 1998
- Bernardi, R dan D. Arnold, 1997. An Examination of Moral Development within Public Accounting by Gender, Staff and Firm. *Contemporary Accounting Research*. Vol.14. Hal 653-668
- Betz, M., O'Connell, L., & Shepard, J. M. (2013). Gender differences in proclivity for unethical behavior. *Citation Classics from The Journal of Business Ethics: Celebrating the First Thirty Years of Publication*, 427-432
- Brown, J. L. (2011). The spread of aggressive corporate tax reporting: A detailed examination of the corporate-owned life insurance shelter. *Accounting Review*, 86(1), 23-57
- Carter, et.al. 2003. "Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value". *The Financial Review* 38, 33-53
- Duasa, J., & Yusof, S. A. (2013). Determinants of risk tolerance on financial asset ownership: A case of Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 14(1), 1-16

- Francis, B. B., Hasan, I., Wu, Q., & Yan, M. (2014). Are female CFOs less tax aggressive? Evidence from tax aggressiveness. *Journal of the American Taxation Association*, 36(2), 171–202
- Ghozali, Imam dan Chariri. Anis. (2007). *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Hadi, N. (2009). Social Responsibility : Kajian Theoretical Framework , Dan Perannya Dalam Riset Dibidang Akuntansi Nor Hadi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(8), 88–109
- Hidayat, O. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Sebagai Variabel Moderating Abstract : This study aims to examine the influence of the corporate social responsibility on tax avoidance with size as a moderating variable at manuf. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7
- Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. *Academy of Management Review*, 28(3), 383–396
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Jensen, M. C. (1994). the Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *Journal of Applied Corporate Finance*, 6(4), 4–23
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831–880
- Khaoula, Aliani, & Ali, Z. M. (2012). The board of directors and the corporate tax planning: Empirical Evidence from Tunisia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2(2), 142
- Khaoula, Aliani, & Mohamed Ali, Z. (2012). Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning in American Firms. *Business Management and Strategy*, 3(1), 72–86
- Khoirunnisa. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70
- Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A modest proposal for improved corporate governance: Business source. *Business Lawyer*, 42(1), 59–78
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718
- Mudiyanselage, P., & Jayathilake, B. (2013). Gender Effects On Risk Perception And Risk Behavior Of Entrepreneurs At Smes In Sri Lanka. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, 2(2), 1–11

- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 737–752
- Riley, W. B., & Chow, K. V. (1992). Asset Allocation and Individual Risk Aversion. *Financial Analysts Journal*, 48(6), 32–37
- Sari, D. K., & Martani, D. (2013). Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness. *Bridging the Gap between Theory, Research and Practice: IFRS Convergence and Application*, 1–33
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Zahra, S. A., & Pearce, J. A. (1989). Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model. *Journal of Management*, 15(2), 291–334